



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 312 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA
DALAM MENGHADAPI PANDEMI PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pandemi penyakit dapat memberikan pengaruh di bidang sosial serta ekonomi sehingga perlu dilakukan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha;

b. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Penyakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI PANDEMI PENYAKIT.

KESATU : Menetapkan pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 7 (tujuh) tahapan, yaitu tahap:

1. Mengenal Prioritas Usaha;
2. Identifikasi Risiko Pandemi;
3. Perencanaan Mitigasi Risiko Pandemi;
4. Identifikasi Respon Dampak Pandemi;
5. Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha;
6. Mengkomunikasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha; dan
7. Uji Perencanaan Keberlangsungan Usaha.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 312 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM MENGHADAPI
PANDEMI PENYAKIT

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dunia memiliki sejarah akan terjadinya beberapa pandemi penyakit. Pandemi influenza yang pernah terjadi pada tahun 1918 disebut Influenza Spanyol/ Spanish Flu menyebabkan kematian sekitar 40-50 juta orang, tahun 1957 Pandemi Influenza Asia menyebabkan kematian sekitar 2-4 juta orang dan tahun 1968 Pandemi Influenza Hongkong dengan kematian sekitar 1 juta orang. Virus pandemi masa lalu tersebut merupakan penyebab influenza musiman saat ini. Tahun 2003 virus Flu Burung mulai dikenal saat itu masih menyerang hanya pada unggas. Pada pertengahan tahun 2005 virus ini mulai meresahkan karena kasusnya mulai menyerang manusia. Virus yang selanjutnya dikenal sebagai penyebab penyakit influenza A Baru H1N1 ini dengan cepat menyebar ke hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia dan dinyatakan sebagai Pandemi Influenza oleh WHO. Meskipun dampak yang ditimbulkan oleh pandemi influenza yang disebabkan oleh virus influenza A Baru H1N1 ini tidak terlalu berat (sakit yang ditimbulkan termasuk kategori ringan-berat) namun penyebarannya yang sangat mudah dan meluas cukup memberikan pengaruh di bidang sosial dan ekonomi.

Tahun 2020, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020 WHO kembali menyatakan terjadinya Pandemi Global untuk penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus jenis baru atau SARS CoV-2, yaitu *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut Covid-19. Penyakit ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan

di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin luas di antaranya dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan sosial, penghentian kegiatan pendidikan di sekolah/ perguruan tinggi, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas.

Secara global, upaya yang telah dilakukan di berbagai negara antara lain karantina Hubei, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara.

Dampak pandemi penyakit memiliki karakteristik yang berbeda karena dampaknya tidak seperti bencana alam biasanya, cakupan dari pandemi akan sangat luas melewati batas-batas geografis negara. Pandemi mempunyai dampak kelumpuhan pelayanan, gangguan keamanan dan ketertiban sosial serta kerugian ekonomi. Kerugian di sektor ekonomi berdampak global pada pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara dengan potensi kerugian ekonomi lebih dari US\$ 2 milyar. Hal ini sebagai akibat lumpuhnya aktivitas telekomunikasi, transportasi, keterbatasan arus uang dan barang, perubahan tingkat permintaan barang dan jasa, berkurangnya perjalanan, tuntutan kebutuhan makanan, meningkatnya angka absensi pekerja, meningkatnya biaya pelayanan kesehatan dan upaya penanggulangan pandemi.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Covid-19 dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga 0,4 persen di akhir tahun 2020. Di bidang Ketenagakerjaan, data dampak yang tercatat hingga tanggal 26 Mei 2020 antara lain: pekerja formal dirumahkan sebanyak 1.046.306 orang, pekerja formal yang terputus hubungan kerjanya (PHK) sebanyak 378.096 orang dan pekerja informal yang terdampak kurang lebih sebanyak 318.000 orang.

Untuk mengantisipasi dampak pandemi penyakit pada sektor usaha diperlukan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit yang merupakan suatu perencanaan yang dibuat oleh perusahaan dalam rangka mengurangi penyebaran pandemi penyakit dengan tetap mempertahankan keberlangsungan usaha.

II. TUJUAN

a. Tujuan umum:

Melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi penyakit dan mencegah penyebaran virus penyebab pandemi penyakit di perusahaan.

b. Tujuan khusus:

1. Mengurangi penyebaran penyakit yang menyebabkan pandemi di perusahaan untuk menurunkan jumlah kesakitan serta kematian;
2. Membantu pengusaha agar dapat mengantisipasi kondisi darurat kesehatan dan kegiatan usahanya tetap berjalan baik selama pandemi penyakit;
3. Membantu manajemen perusahaan dalam menyusun strategi menghadapi pandemi penyakit;
4. Mengurangi dampak negatif ekonomi dan sosial akibat pandemi penyakit.

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman ini disusun bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan keberlangsungan usahanya dalam menghadapi pandemi penyakit.

Pedoman ini berisi tentang kebijakan nasional menghadapi pandemi penyakit dan panduan yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha.

Pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk pengusaha, manajemen perusahaan, HSE, P2K3, HRD, pekerja, bipartit (antara pengusaha dan pekerja), dan pelayanan kesehatan kerja.

BAB II

PANDEMI PENYAKIT DAN DAMPAKNYA BAGI KEBERLANGSUNGAN USAHA

I. PANDEMI PENYAKIT DAN KEBIJAKAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

1. Pandemi Penyakit

Pandemi atau epidemi global atau wabah global merupakan terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografi yang luas. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), suatu pandemi dikatakan terjadi bila ketiga syarat berikut telah terpenuhi yaitu timbulnya penyakit bersangkutan merupakan suatu hal baru pada populasi bersangkutan, agen penyebab penyakit menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit serius, serta agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia.

Di Indonesia, ketentuan mengenai wabah telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan mengenai kekarantinaan kesehatan untuk mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Pemerintah Pusat dapat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Setelah adanya ketetapan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat maka Pemerintah melakukan Kekarantinaan Kesehatan berupa:

1. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
3. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
4. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

2. Kebijakan dan Dampak Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

1. Kebijakan

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Dampak

Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat yang dilanjutkan dengan tindakan kekarantinaan kesehatan dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha selain dampak yang diakibatkan oleh penyakit itu sendiri. Hal ini karena inti kekarantinaan kesehatan adalah meminimalkan penularan dengan cara meminimalkan kontak yang dilaksanakan melalui suatu tindakan di antaranya berupa pembatasan sosial berskala besar, sehingga dapat menimbulkan dampak bagi perusahaan yang berada di dalam maupun di sekitar wilayah kekarantinaan kesehatan.

Dampak dilaksanakannya pembatasan sosial di antaranya:

- a) Kegiatan usaha yang berada dalam wilayah pembatasan sosial:
 - 1) Penghentian/pembatasan sementara kegiatan usaha;
 - 2) Gangguan arus suplai barang dan jasa;
 - 3) Ketidakhadiran pekerja cukup signifikan;
 - 4) Terganggunya mobilitas pekerja;
 - 5) Terganggunya kegiatan operasional usaha;

Kegiatan usaha yang berada di luar wilayah pembatasan sosial tetap mempunyai potensi untuk mengalami dampak pandemi apabila:

- 1) Pekerja yang berasal dari wilayah pembatasan sosial tidak dapat bekerja;
- 2) Suplai barang dan jasa terganggu bila sumber suplai berasal atau terhalang oleh wilayah pembatasan sosial.

II. DAMPAK PANDEMI PENYAKIT

Dampak pandemi yang mungkin terjadi pada kegiatan usaha dapat berupa:

a. Ketidakhadiran tenaga kerja.

Tenaga kerja tidak masuk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. mereka menjadi korban (sakit/meninggal);
2. harus merawat keluarga yang sakit covid-19; dan
3. pembatasan pergerakan orang.

b. Menurunnya atau terganggunya pasokan bahan baku.

Pasokan yang terganggu dapat disebabkan karena berkurangnya produksi, terganggunya transportasi atau karena ketergantungan antar perusahaan.

c. Perubahan *demand*/kebutuhan dari konsumen.

Kebutuhan konsumen akan barang-barang terkait dengan upaya pencegahan, bahan makanan, dan kebutuhan penting lainnya akan meningkat secara dramatis, sedangkan kebutuhan lain yang bukan prioritas mungkin akan turun drastis.

Jika kondisi-kondisi di atas tidak diantisipasi dengan baik, kemungkinan terjadinya kelumpuhan dari sektor vital (listrik, komunikasi, dan lain-lain) dapat memicu terjadinya gangguan yang lebih luas pada perekonomian maupun menimbulkan masalah sosial.

BAB III

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA

Manajemen perusahaan harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi sehingga keberlangsungan usaha dapat terjamin serta meningkatkan ketahanan dalam situasi *emergency* dan ikut berkontribusi dalam perlindungan masyarakat secara umum.

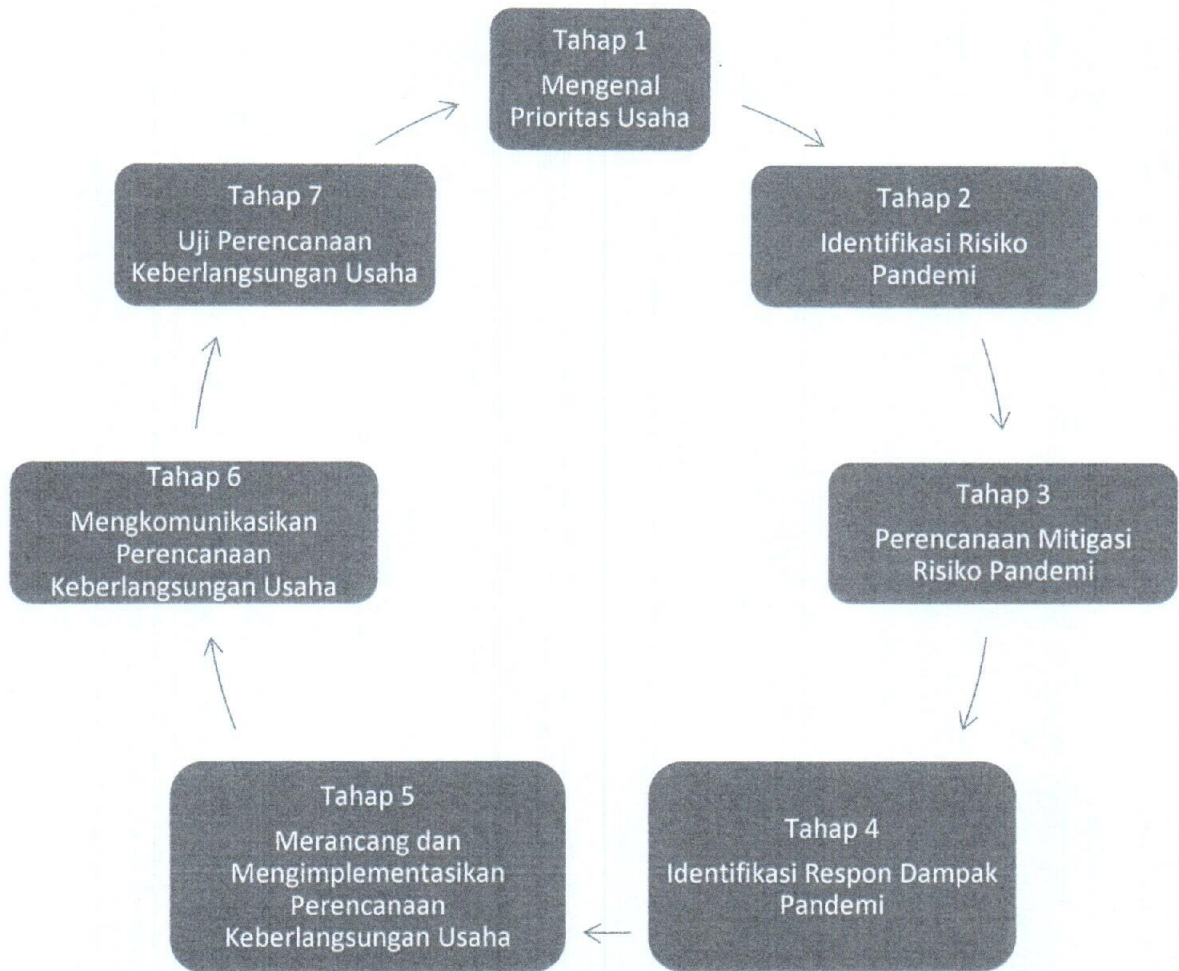
Untuk mempertahankan kegiatan usaha selama pandemi penyakit, manajemen perusahaan harus menyusun perencanaan keberlangsungan usaha. Perencanaan keberlangsungan usaha ini dimaksudkan untuk mempertahankan semua sumber utama usaha yang ada untuk mendukung kegiatan esensial dalam lembaga usaha.

Dalam penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha, perlu membentuk tim yang bertanggung jawab untuk:

1. menyusun rencana kesiapsiagaan;
2. melakukan kaji ulang;
3. ujicoba rencana kesiapsiagaan (*tabletop, drill, simulasi dll*);
4. menyempurnakan rencana kesiapsiagaan.

Jika perusahaan telah mempunyai rencana kesiapsiagaan menghadapi kegawatdaruratan/*emergency* terhadap potensi bahaya (*hazard*) yang lain, akan lebih mudah dalam penyusunan perencanaan ini karena dapat menyesuaikan rencana kesiapsiagaan yang sudah ada dengan prediksi dampak yang akan ditimbulkan pandemi penyakit.

Penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



Keikutsertaan perwakilan serikat pekerja sangat dianjurkan pada setiap tahapan proses perencanaan.

A. TAHAP 1: MENGENAL PRIORITAS USAHA

1. Menentukan produk/ layanan utama usaha

a) Tujuan:

- 1) Mengidentifikasi produk/jasa layanan utama dari perusahaan.
- 2) Membuat peringkat produk/jasa layanan utama berdasarkan tingkat prioritasnya.

Penyusunan peringkat ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- i. Produk/layanan mana yang memberikan kontribusi paling besar/penting atas usaha?
- ii. Seberapa besar faktor eksternal berpengaruh pada penyediaan produk/layanan utama tersebut, semakin besar pengaruh faktor eksternal, semakin sulit untuk memastikan keberlangsungan usaha.

b) Output:

Daftar produk/jasa layanan utama perusahaan dan pemeringkatannya. Daftar peringkat dari produk/layanan utama ini perlu diperbaharui secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan situasi pandeminya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1 : Buatlah daftar produk/jasa layanan utama perusahaan.

Langkah 2 : Buatlah peringkat (prioritas) produk/jasa layanan utama perusahaan.

Variabel yang dapat dipergunakan untuk melakukan pemeringkatan di antaranya adalah tanggal jatuh tempo waktu pemesanan, jumlah SDM, ketersediaan SDM, bahan baku hingga potensi keuntungan.

Langkah 3 : Diskusikan kembali dengan tim, apakah pemeringkatan tersebut sudah sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Pilihlah beberapa produk/jasa utama yang paling layak.

Pertimbangkan bahwa keberlangsungan perusahaan terjamin dengan melakukan prioritas usaha.

Bila dalam melakukan pemeringkatan di atas terdapat produk/jasa yang tidak terpilih sebagai prioritas usaha, bukan berarti produk/jasa tersebut akan diabaikan; namun saat pandemi tidak menjadi prioritas utama. Produk/jasa tersebut akan dilaksanakan kembali pada saat kondisi kembali normal pasca pandemi penyakit.

2. Aktivitas/kegiatan usaha saat pandemi

a) Tujuan:

Mengidentifikasi aktivitas/proses inti yang mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa utama perusahaan.

b) Output

- 1) Daftar aktivitas/proses inti yang menghasilkan produk/jasa.
- 2) Alternatif dalam melaksanakan kegiatan ini.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1 : Buatlah daftar keseluruhan aktivitas/proses produk/jasa layanan utama perusahaan yang sudah diprioritaskan sebelumnya.

Langkah 2 : Pilihlah aktivitas/proses inti yang mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan produk/jasa layanan utama.

Dalam melakukan identifikasi aktivitas/kegiatan usaha yang esensial tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Apakah aktivitas/kegiatan usaha tersebut dapat dihentikan sementara tanpa mengganggu hasil akhir?
- 2) Apakah aktivitas/kegiatan yang esensial yang sulit dilakukan, tetapi relatif mudah dilakukan oleh pihak luar?
- 3) Adakah alternatif berupa cara yang berbeda dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan esensial tersebut tanpa mengganggu produktivitas? (misalnya: penggabungan dua aktivitas produksi).

3. Dukungan terhadap aktivitas/kegiatan yang esensial

Untuk memastikan aktivitas inti yang menentukan keberlangsungan usaha tetap berjalan lancar maka diperlukan dukungan. Langkah berikut akan membantu dalam menentukan dukungan yang diperlukan.

a) Tujuan

Mengidentifikasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas/kegiatan inti yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Untuk mengidentifikasikannya, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Siapa kepala bagian/penanggung jawab yang mengawasi aktivitas-aktivitas penting tersebut?
 - 2) Bagaimana distribusi tanggung jawabnya?
 - 3) Apakah pengetahuan dan kemampuan menjalankan aktivitas/kegiatan di bagian tersebut dimiliki oleh semua pekerja di bagian tersebut?
 - 4) Dapatkah para pekerja di bagian tersebut saling bertukar peran/posisi kerja dengan mudah?
- b) Output
- 1) Posisi pekerja kunci dan alternatif penggantian karyawan yang berhalangan.
 - 2) Dukungan sumber daya yang diperlukan; misalnya bahan baku, BBM, spare part mesin, teknologi informasi, administrasi personalia dan keuangan.
- c) Langkah Pelaksanaan
- Langkah 1 : Buatlah daftar hierarki staff/posisi di aktivitas inti.
- Langkah 2 : Tentukan lingkup tanggungjawab dan kecakapan yang disyaratkan setiap posisi.
Apakah pengetahuan dan kemampuan menjalankan aktivitas/kegiatan di suatu bagian dimiliki oleh semua pekerja di bagian tersebut?
- Langkah 3 : Jika ada karyawan berhalangan bekerja, apakah dapat digantikan oleh karyawan lain?
- 1) Dapatkah pekerja di bagian tersebut saling bertukar peran/posisi kerja dengan mudah?
 - 2) Apakah perlu suatu tim khusus untuk menggantikan posisi yang berhalangan?
- Langkah 4 : Identifikasi dukungan lain yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya aktivitas-aktivitas penting tersebut. Hal-hal berikut ini perlu diperhatikan dalam menentukan jenis dukungan yang diperlukan.

- 1) Sumber daya apa yang diperlukan dalam menjaga aktivitas penting tersebut tetap berfungsi? (IT, logistik, *power supply*, dan lain-lain)
- 2) Dalam situasi apa, perusahaan akan meningkatkan/menurunkan/menyesuaikan sumber daya/dukungan tersebut?
- 3) Berapa lama perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usaha dengan jumlah sumber daya yang ada? Berapa jumlah sumber daya minimal yang dibutuhkan untuk menjaga kegiatan usaha tetap berjalan?

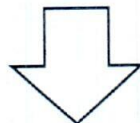
Contoh Pelaksanaan Tahap 1

PT. XYZ

(Perusahaan Pertenunan)

PRIORITAS UTAMA

| No | Produk/Layanan Utama Usaha | Aktivitas/Layanan Penting | Produk/Layanan Utama Usaha |
|----|----------------------------|--|---|
| 1. | Kain mentah/grey | <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan/pengeluaran benang dari gudang benang.2. Penerimaan/pengeluaran bahan-bahan penunjang.3. Warping.4. Tying.5. Sizing.6. Weaving.7. Inspecting & packing.8. Penyimpanan kain mentah dalam gudang kain.9. Pengiriman. | <ul style="list-style-type: none">• Sumberdaya manusia.• Sistem administrasi dan keuangan.• Mesin-mesin produksi.• Pasokan bahan baku dan bahan penunjang.• Pasokan listrik.• Pasokan BBM. |



Dan seterusnya

B. TAHAP 2: IDENTIFIKASI RISIKO PANDEMI

Setelah mendapatkan daftar prioritas produk/layanan serta teridentifikasinya aktivitas dan faktor pendukungnya pada Tahap 1, perlu dilakukan upaya identifikasi risiko pandemi penyakit terhadap komponen-komponen yang telah teridentifikasi tersebut. Pada tahap ini, akan dilakukan upaya melakukan penilaian risiko, sehingga akan didapatkan prioritas-prioritas dari skenario ancaman untuk dilakukan upaya mitigasi maupun respon pada tahap berikutnya.

Penilaian risiko harus dilakukan secara kerja tim dengan mempertimbangkan tiga komponen penting, yaitu:

1. Identifikasi skenario ancaman yang mungkin terjadi

Skenario perlu dikembangkan secara spesifik sesuai dengan kondisi perusahaan. Skenario harus dibuat dari yang paling ringan sampai paling berat. Semua kemungkinan perlu diidentifikasi dan didaftar, untuk kemudian dilakukan skoring untuk menentukan skenario yang akan digunakan.

Analisa dapat dilakukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya (probabilitas) dan tingkat keparahan ancaman tersebut.

a) Tujuan

- 1) Mengidentifikasi skenario ancaman-ancaman yang mungkin terjadi pada saat pandemi penyakit.
- 2) Mengukur bobot skenario ancaman yang mungkin terjadi.

b) Output

- 1) Daftar skenario ancaman yang potensial timbul sebagai akibat dari pandemi penyakit.
- 2) Bobot skenario ancaman yang mungkin terjadi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1 : Petakanlah skenario ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan.

Skenario ancaman ini dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, dalam konteks terkait dengan pandemi penyakit.

Langkah 2 : Berikan bobot pada skenario ancaman yang sudah diidentifikasi berdasarkan dua variabel yaitu: tingkat kemungkinan terjadinya

ancaman (probabilitas), dan tingkat keparahan (*severity*) jika ancaman itu terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Penentuan *scoring* ini berdasarkan kesepakatan bersama dari tim manajemen yang menyusun Rencana kesiapsiagaan. Skoring sangat bersifat relatif dan berlaku spesifik pada perusahaan masing-masing.
- 2) Setiap skenario ancaman yang teridentifikasi dianalisa berdasarkan tingkat probabilitas dan keparahan ancaman tersebut.
- 3) Skala untuk pembobotan skenario ancaman berada pada rentang 1-5, dengan angka 1 untuk tingkat terendah dan 5 untuk tertinggi.

Langkah 3 : Gunakan Tabel Pembobotan Skenario Ancaman sebagai acuan pemberian bobot pada setiap skenario ancaman.

Langkah 4 : Pilihlah minimal lima ancaman (dapat lebih) dengan bobot tertinggi yang mungkin terjadi di perusahaan.

Tabel Referensi
Pembobotan Skenario Ancaman

| | | KEMUNGKINAN TERJADINYA | | | |
|---|--------------|------------------------|-------|--------|--------------|
| | | Sangat Besar | Besar | Sering | Sangat Kecil |
| | | A | B | C | D |
| TINGKAT KEPARAHAN | Kategori I | 5 | 5 | 4 | 3 |
| | Kategori II | 5 | 4 | 3 | 2 |
| | Kategori III | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | Kategori IV | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Peringkat Ancaman Threat Assessment Code (TAC) | | | | | |
| Keparahan | | Bobot Skenario Ancaman | | | |
| Kategori I = Sangat Parah | | 1 =Dapat diabaikan | | | |
| Kategori II = Parah | | 2 = Kecil | | | |
| Kategori III = Sedang | | 3 = Sedang | | | |
| Kategori IV = Ringan | | 4 = Serius | | | |
| | | 5 = Kritis | | | |

2. Analisis kerentanan terhadap kegiatan usaha

Analisa kerentanan terhadap kegiatan usaha, menjadi salah satu komponen untuk melakukan penilaian risiko. Perlu dipetakan titik-titik kerentanan dalam organisasi pada setiap skenario ancaman yang telah teridentifikasi. Ada beberapa contoh variabel yang dapat dipergunakan, misal: SDM, material produksi, fasilitas peralatan, keuangan, pemasaran, manajemen informasi, dan lain-lain.

a) Tujuan

- 1) Mengidentifikasi kerentanan organisasi yang terkait langsung dengan setiap skenario ancaman.
- 2) Mengukur bobot setiap kerentanan yang teridentifikasi.

b) Output

Daftar kerentanan dalam perusahaan yang terkait langsung dengan setiap skenario ancaman beserta bobotnya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Petakan titik-titik kerentanan (*vulnerability*) dalam perusahaan anda pada setiap prioritas skenario ancaman yang teridentifikasi.

Variable yang harus diperhitungkan adalah:

- 1) Kerentanan pada faktor SDM, misalnya: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesadaran untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman infeksi.
- 2) Kerentanan pada faktor material produksi; semisal kondisi stok dan tingkat ketergantungan pada pemasok.
- 3) Kerentanan pada faktor fasilitas dan peralatan; semisal ketergantungan pada PLN dan pasokan suku cadang.
- 4) Kerentanan pada faktor keuangan; semisal *cashflow* perusahaan yang terbatas dan, beban kredit bank.
- 5) Kerentanan pada faktor pemasaran; misalnya *coverage* pasar dan ketergantungan pada partner distributor.
- 6) Kerentanan pada faktor manajemen informasi; semisal tidak adanya sistem jaringan informasi internal dalam perusahaan.
- 7) Kerentanan pada faktor keamanan korporat dan keselamatan kerja karyawan; semisal terbatasnya petugas Satpam dan peralatan keamanan atau ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan peralatan keselamatan kerja.

Penting untuk diperhatikan, bahwa tidak semua variabel di atas akan muncul pada sebuah skenario ancaman. Contoh: ancaman tersebarnya

virus dalam lingkungan perusahaan, akan terkait langsung dengan pengetahuan karyawan terhadap penyakit tersebut, cara pencegahan dan pemahamannya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (kerentanan pada faktor SDM, Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Langkah 2: Berdasarkan variabel di atas, lakukan pembobotan terhadap kerentanan perusahaan yang terkait langsung dengan setiap skenario ancaman. Pembobotan dengan menggunakan skala: yaitu nilai 5 untuk bobot yang tertinggi dan nilai 1 untuk bobot terendah.

Penentuan bobot dilakukan bersama dalam tim, bersifat relatif dan dapat berubah sesuai kondisi perusahaan.

3. Analisis kemampuan (*capability*) perusahaan

Komponen terakhir yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian risiko adalah kemampuan dari perusahaan itu sendiri dalam mengendalikan setiap skenario ancaman pandemi.

a) Tujuan

- 1) Mengidentifikasi kemampuan (*capability*) perusahaan dalam mengendalikan setiap skenario ancaman yang menjadi prioritas.
- 2) Mengukur bobot kemampuan perusahaan untuk menghadapi ancaman.

b) Output

Daftar kemampuan perusahaan untuk menghadapi ancaman beserta bobotnya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Petakanlah kemampuan (*capability*) perusahaan dalam menghadapi setiap skenario ancaman yang telah diprioritaskan.

Variabel-variabel yang dapat dipergunakan untuk melakukan skoring terhadap kemampuan perusahaan adalah:

- 1) Kemampuan sumber daya manusia

2) Kemampuan teknis (fasilitas dan peralatan)

3) Kemampuan finansial

Langkah 2: Lakukan pembobotan terhadap setiap kemampuan yang teridentifikasi. Pembobotan menggunakan skala 1 - 5, yaitu bobot 5 untuk bobot tertinggi dan 1 untuk bobot terendah. Penentuan dari bobot ini dilakukan dalam satu dan bersifat relatif yang dapat berubah sesuai kondisi perusahaan.

Contoh Pelaksanaan Tahap 2

PT. XYZ
(Perusahaan Pertenunan)
IDENTIFIKASI RISIKO

| No | Skenario Ancaman | Analisa Ancaman | | Kerentanan Perusahaan | | Kemampuan Perusahaan | | Nilai Risiko | |
|----|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|----------------------|---|--------------|-----|
| | | Kemungkinan | Keparahan | Bobot | Identifikasi | Bobot | Identifikasi | | |
| 1 | Karyawan sakit >30% | Tinggi | Tinggi | 5 | <ul style="list-style-type: none"> Perilaku hidup bersih dan sehat karyawan Kebersihan pabrik Sirkulasi udara dalam ruang produksi | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Kemampuan operator mesin untuk ditambah beban kerjanya. Klinik perusahaan Penyediaan sarana APD | 2 | 10 |
| 2 | Pasokan benang terganggu | Tinggi | Tinggi | 5 | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perusahaan produsen benang lokal Naiknya harga benang | 5 | Menambah stok benang <i>Cashflow</i> | 3 | 8.3 |
| 3 | Pencurian dalam perusahaan | Tinggi | Sedang | 3 | Hubungan sosial manajemen pabrik dan masyarakat sekitar. | 3 | Kondisi sistem pengamanan (personil, alat, SOP) | 3 | 3 |



Dan seterusnya

C. TAHAP 3: PERENCANAAN MITIGASI RISIKO PANDEMI

Tahap ini merupakan tahapan untuk merencanakan upaya-upaya mitigasi terhadap skenario ancaman yang telah teridentifikasi. Upaya mitigasi tersebut harus spesifik dan mencakup beberapa hal berikut:

1. Menentukan target mitigasi;
2. Merencanakan tindakan untuk mitigasi;
3. Penjadwalan pelaksanaan tindakan;
4. Kebutuhan (sumber daya) untuk melaksanakan tindakan mitigasi;
5. Penanggung jawab pelaksanaan tindakan mitigasi.

Hasil yang diharapkan dalam tahap ini adalah sebuah matrik rencana kegiatan untuk mitigasi risiko terhadap pandemi.

Hal-hal berikut ini dapat dijadikan referensi dalam mempersiapkan kegiatan/upaya mitigasi risiko pandemi:

1. Standar Prosedur Operasional

Informasi dan data penting terkait dengan operasional perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan, seperti:

- a) Apakah informasi penting tersebut telah tercatat dan dikelola?
- b) Apakah semua pekerja yang terkait mengetahui informasi penting tersebut?

Untuk memastikan hal-hal tersebut, sangatlah penting untuk menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dapat menjelaskan:

- a) instruksi jelas yang dapat memastikan keberlangsungan proses-proses penting.
- b) strategi yang efektif dan efisien.
- c) *back up* data penting.
- d) penyimpanan data alternatif dan lain-lain.
- e) tentukan hirarki pengambil keputusan dan komando dalam keadaan darurat jika pengambil keputusan berhalangan.

Pada tingkat pandemi yang ada, kemungkinan terjadi ketidakhadiran pekerja pada unit esensial. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, perlu dipertimbangkan suatu pelatihan silang (*cross-skilling/cross-training*) antar pekerja. Diagram alur kerja atau standar prosedur operasional yang harus dikerjakan perlu dibuat untuk memudahkan pekerja yang akan menggantikan pekerja lain.

2. Cara Kerja yang Fleksibel

Buat perencanaan mekanisme kerja yang fleksibel untuk mengantisipasi kemungkinan dampak pandemi. Penerapan cara kerja yang fleksibel, salah satu contohnya adalah bekerja dari rumah atau dari lokasi lain yang aman atau hanya pekerja pada unit esensial saja yang masuk kerja. Jika hal tersebut juga tidak memungkinkan, pertimbangkan untuk menurunkan produksi/aktivitas bahkan jika perlu, penghentian sementara kegiatan perusahaan.

Dalam kondisi pandemi, perusahaan harus mempertimbangkan perubahan dari mekanisme kerja yang biasa dilakukan ke arah mekanisme kerja fleksibel untuk mencapai keseimbangan antara faktor keselamatan dengan kewajiban masuk kerja.

3. Rantai pasokan

Perencanaan keberlangsungan usaha bukanlah komponen mandiri yang dapat berdiri sendiri. Salah satu hal penting yang berpengaruh besar adalah kesiapan dari pemasok utama. Kesiapan mereka akan sangat mendukung keberhasilan rencana kesiapsiagaan usaha. Pastikan pemasok utama mempunyai rencana kesiapsiagaan, dan ada upaya yang memastikan bahwa barang pasokan bebas dari paparan/kontaminasi. Jika belum, ajak dan bimbing mereka untuk mempersiapkannya.

4. Komunikasi

Informasi dan pengetahuan tentang pandemi, penyebab, cara pencegahannya dan bagaimana sikap dan respon dari perusahaan perlu diketahui oleh semua pekerja. Karena itu, perlu untuk membentuk atau memberdayakan "tim komunikasi perusahaan" untuk melakukan komunikasi risiko pandemi. Dalam situasi darurat, tim ini berwenang untuk mengatur dan menjamin lancarnya komunikasi internal maupun eksternal. Komunikasi internal diperlukan untuk selalu berhubungan dengan pekerja atau unit-unit terkait, sehingga segala instruksi, penanganan maupun bantuan bagi pekerja dapat berjalan lancar. Nomor khusus/hotline mungkin perlu diaktifkan, dan pastikan bahwa seluruh daftar kontak selalu diperbaharui secara berkala.

5. Kebijakan kepegawaian

Kaji ulang kebijakan tentang SDM perusahaan (misal: cuti sakit, perjalanan, kompensasi, lembur, dll) terkait dengan dampak-dampak yang mungkin timbul karena pandemi.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan kerja sangatlah penting untuk menjamin pekerja dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dapat mencegah risiko penularan di perusahaan khususnya melalui upaya preventif dan promotif. Upaya preventif dan promotif di perusahaan dalam rangka pencegahan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan kerja. Pengendalian lingkungan kerja mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan penularan penyakit.

Langkah-langkah pencegahan penularan perlu mulai dipraktekkan di perusahaan, antara lain:

a) Pola hidup bersih dan sehat:

- 1) cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- 2) menerapkan etika batuk dan bersin;
- 3) menerapkan *physical distancing*.

b) Penerapan hygiene dan sanitasi perusahaan.

c) Pembatasan kontak antar pekerja.

d) Pemakaian alat pelindung diri.

Untuk mencegah penularan Covid-19 di tempat kerja, pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri pernafasan.

e) Penerapan gizi kerja.

Gizi kerja adalah penyediaan dan pemberian asupan zat gizi kepada tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan selama berada di tempat kerja guna mendapatkan tingkat kebutuhan dan produktivitas kerja setinggi-tingginya. Manfaat penerapan gizi kerja selain untuk optimalisasi produktivitas dan efisiensi kerja, dapat meningkatkan daya tahan tubuh pekerja sehingga tidak mudah mengalami gangguan kesehatan termasuk Covid-19.

Kegiatan mitigasi risiko pandemi, sebagai berikut:

1. Analisis risiko kerentanan terhadap kegiatan usaha

a) Tujuan

Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) oleh perusahaan dari setiap skenario ancaman yang diprioritaskan penanganannya.

b) Output

Spesifikasi risiko yang dapat diterima setiap skenario ancaman yang diprioritaskan penanganannya.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Berdasarkan prioritas skenario ancaman yang sudah di tentukan sebelumnya, lakukan curah pendapat (*brainstorming*) untuk melihat risiko riil apakah yang harus ditanggung perusahaan apabila skenario tersebut benar-benar terjadi.

Langkah 2: Diskusikan dalam tim, sejauh mana batas kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko dari setiap skenario ancaman. Hasilnya boleh jadi akan jauh lebih rendah dari risiko yang terkandung dalam ancaman tersebut.

Contoh:

Berdasarkan data yang diperoleh dari pandemi sebelumnya, angka ketidakhadiran karyawan (*absenteisme*) mencapai 40%. Perusahaan praktis akan lumpuh jika kehilangan karyawan sebanyak itu. Dari diskusi yang terjadi, tim sepakat bahwa agar perusahaan dapat terus beroperasi hanya mampu menanggung *absenteisme* maksimal 15%. Angka 15% inilah yang menjadi target mitigasi perusahaan.

2. Merencanakan tindakan untuk mitigasi

Guna mencapai suatu target mitigasi, perlu dilakukan serangkaian tindakan tertentu. Tindakan tersebut harus dapat mencapai target mitigasi yang telah ditetapkan.

a) Tujuan

Menyusun rencana tindakan untuk mencapai target mitigasi.

b) Output

Rencana tindakan untuk mencapai target mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Tentukan target mitigasi.

Upayakan agar target mitigasi ditetapkan serealistis mungkin, sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Langkah 2: Jabarkan masing-masing target mitigasi yang sudah disusun dengan tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.

- 1) Tindakan mitigasi untuk mencapai target mitigasi dapat terjadi lebih dari satu.
- 2) Informasi dari tindakan tersebut sebaiknya bersifat detail, jelas dan dapat diukur hasilnya.

Langkah 3: Periksa kembali kemungkinan pelaksanaan tindakan yang disusun dan kemungkinan untuk mewujudkan target tersebut (target mitigasi dapat dilaksanakan secara bertahap berdasar kemampuan dan ketersediaan sumber daya).

- 1) Apakah target yang ditetapkan terlalu optimistis atau sebaliknya, terlalu pesimistis?
- 2) Apakah langkah yang direncanakan benar-benar dapat dilakukan?

3. Penjadwalan pelaksanaan tindakan

a) Tujuan

Menyusun jadwal rencana tindakan untuk mencapai target mitigasi.

b) Output

Jadwal rencana tindakan untuk target mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Buatlah estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembuatan rencana setiap tindakan mitigasi yang telah ditetapkan.

- Tentukan satuan waktunya secara jelas, sehingga mudah dikontrol dan dikendalikan.

Langkah 2: Periksa kembali apakah pekerjaan perencanaan tersebut dalam diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

- Segera lakukan perbaikan apabila ternyata waktu yang ditetapkan terlalu panjang atau sebaliknya, terlalu pendek.

4. Kebutuhan untuk melaksanakan tindakan mitigasi

a) Tujuan

Menentukan kebutuhan/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tindakan guna mencapai target mitigasi.

b) Output

Daftar kebutuhan untuk melaksanakan pelaksanaan tindakan mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Identifikasikan serinci mungkin sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tindakan mitigasi.

Langkah 2: Rincikan setiap kebutuhan sumberdaya yang teridentifikasi.

- Kebutuhan tersebut dapat berupa kebijakan, kewenangan, material, dana dan personil.

Langkah 3: Periksa setiap rincian kebutuhan sumberdaya dengan seksama.

- Pastikan bahwa perusahaan mampu menyediakannya. Bila tidak, carilah alternatif lain yang sesuai dengan kekuatan perusahaan.

5. Penanggung jawab pelaksanaan mitigasi

a) Tujuan

Menentukan personel yang akan bertanggungjawab pada pelaksanaan tindakan mitigasi.

b) Output

Daftar personel yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tindakan mitigasi.

c) Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Identifikasikan kualifikasi personel yang diperlukan untuk duduk sebagai penanggungjawab pelaksanaan tindakan mitigasi.

- Perhatikan dengan teliti setiap tindakan mitigasinya, karena sebagian besar merupakan serangkaian mata rantai aktivitas yang melibatkan beberapa unit kerja yang berbeda.

Langkah 2: Tetapkan nama personil dan jabatannya.

Langkah 3: Jika lebih dari satu orang, tetapkan koordinatornya.

Contoh Pelaksanaan Tahap 3

PT. XYZ

(Perusahaan Pertenuunan)

PERENCANAAN MITIGASI

| No | Skenario Ancaman | Target Mitigasi | Perencanaan Tindakan | Perencanaan Tindakan | Kebutuhan Sumberdaya | Penanggung- jawab |
|----|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
| | Karyawan sakit > 30% | Karyawan sakit maksimal 5 % | <p>1. Menyusun materi dan strategi penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>2. Menyusun SOP untuk pengendalian infeksi ditempat kerja.</p> <p>3. Menyiapkan ventilator udara tambahan dalam ruang produksi</p> <p>4. Menyiapkan prosedur penambahan beban kerja.</p> | <p>1. Satu bulan.</p> | <p>1. Dana</p> <p>2. Personel penyuluh</p> | <p>1. Manager SDM</p> <p>2. Manager Teknik</p> <p>3. Manager Keuangan.</p> <p>4. Manager Safety</p> |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|-----|---|--|
| | Pasokan benang terganggu | Stok benang aman selama 6 bulan pasca deklarasi pandemi. | 1. Evaluasi perusahaan pemasok benang. 2. Persiapan gudang. 3. <i>Listing</i> pembeli utama. | SDA | 1. Dana 2. <i>Space</i> gudang 3. Tenaga bongkar muat | 1. Manager Logistik 2. Manager Produksi 3. Manager Pemasaran |
| | Pencurian dalam area perusahaan. | Pencurian nihil | 1. Penguatan perimeter. 2. Penguatan Satuan Pengamanan. 3. Penguatan peralatan pengamanan. | SDA | 1. Personil 2. Dana 3. Peralatan pengamanan | 1. Manager SDM 2. Manager Logistik 3. Manager Keamanan |

D. TAHAP 4: IDENTIFIKASI RESPON DAMPAK PANDEMI PENYAKIT

1. Tujuan

- a) Mendefinisikan situasi pemicu aktivasi respon dampak pandemi penyakit.
- b) Mengidentifikasi respon yang dilakukan dalam kondisi pandemi penyakit.

Setelah melakukan identifikasi upaya-upaya mitigasi terhadap skenario ancaman dari pandemi Penyakit, perencanaan selanjutnya adalah identifikasi respon terhadap dampak pandemi penyakit. Pada saat mulai munculnya pandemi, perusahaan juga sudah harus melakukan upaya-upaya respon spesifik yang disesuaikan dengan situasi perkembangan pandemi itu sendiri.

Dalam mengidentifikasi tindakan/upaya respon yang spesifik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

Identifikasi situasi pemicu aktivasi (*trigger*) respon. Dalam melakukan identifikasi dapat dipertimbangkan berdasarkan (i) situasi penyebaran geografis dari pandemi dan/atau (ii) tingkat keparahan dari pandemi penyakit tersebut.

Tentukan target respon dari skenario ancaman yang ada berdasarkan situasi pemicu respon yang telah teridentifikasi. Target respon ini dapat mengacu pada target mitigasi yang sudah direncanakan sebelumnya.

- a) Tentukan tindakan respon yang telah ditetapkan berdasarkan rencana mitigasi sebelumnya dengan penyesuaian sesuai situasi pemicu responnya.
- b) Lakukan penilaian kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tindakan respon.
- c) Tentukan penanggung jawab setiap tindakan respon.

Pada saat terjadinya pandemi, hal-hal dibawah ini juga perlu dipastikan telah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya, agar perusahaan menjadi tempat yang aman dari potensi penularan dan keberlangsungan kegiatan usaha juga dapat terjaga.

a) Pekerja

Upaya-upaya pencegahan penularan di perusahaan misalnya kebersihan, pembatasan sosial (*social distancing*), penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai perlu dilaksanakan. Pastikan bahwa pekerja telah dibekali dengan informasi yang cukup tentang upaya pencegahan penularan dan cara-cara penggunaan APD dengan benar.

Perhatikan juga sarana transportasi yang aman bagi pekerja, tergantung dari keseriusan dampak dari pandemi dan kebutuhan perusahaan, pertimbangkan juga kemungkinan bahwa akan ada pekerja esensial yang harus tetap tinggal di perusahaan selama pandemi berlangsung.

b) Pelanggan dan pemasok

Pertahankan komunikasi dengan pelanggan dan pemasok, pastikan bahwa mereka mengetahui bahwa perusahaan telah siap dan sanggup menghadapi kondisi pandemi ini. Selalu perbaharui data-data pelanggan, dan usahakan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Lakukan kajian untuk mengurangi biaya pengiriman
- 2) Tinjau kemungkinan untuk melakukan diversifikasi dalam produksi, untuk menyebar risiko diantara kategori produk yang berbeda.

c) Komunikasi

Manfaatkan tim komunikasi yang telah dibentuk untuk menyampaikan semua informasi yang diperlukan, terutama informasi keluar baik ke pelanggan maupun pemasok. Sampaikan pesan-pesan tentang kesiapan dan perhatikan "komunikasi risiko" untuk menghindari kepanikan dan ketakutan. Karena itu, perlu untuk mempersiapkan strategi komunikasi pada saat kondisi darurat sebelum terjadi.

2. Output

- a) Situasi pemicu aktivasi respon pandemi penyakit teridentifikasi.
- b) Terbentuknya tim penanggulangan pandemi penyakit.

3. Langkah pelaksanaan

Langkah 1: Situasi pemicu aktivasi respon pandemi diidentifikasi berdasarkan:

- a) Analisa situasional yang dilakukan oleh tim manajemen perusahaan berdasarkan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
- b) Referensi dari asosiasi usaha atau perusahaan lain.
- c) Referensi dari otoritas kesehatan setempat.
- d) Referensi dari Badan Kesehatan Dunia.

Langkah 2: Tentukan target respon berdasarkan situasi aktivasi respon yang diharapkan. Target mitigasi ini dapat mengacu kepada target mitigasi yang sudah direncanakan sebelumnya.

Langkah 3: Berdasarkan target respon yang telah ditetapkan sebelumnya, tentukan tindakan respon yang sesuai untuk mencapai target tersebut. Tindakan respon tersebut dapat didasarkan pada rencana tindakan mitigasi yang telah ada (SOP yang telah terbentuk sebelumnya) dengan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas tindakan respon

Langkah 4: Lakukan penilaian kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan penanggulangan/respon yang telah ditetapkan. Penanggulangan kebutuhan sumberdaya tersebut dapat berasal dari dukungan internal atau eksternal perusahaan. Pada kondisi wabah sebaiknya lebih menggantungkan kepada pasokan kebutuhan dari dalam perusahaan.

Langkah 5: Tentukan penanggungjawab setiap tindakan respon.

- a) Penentuan penanggungjawab setiap tindakan respon dapat didasarkan pada alokasi personel yang sudah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya.
- b) Disisi lain ada kemungkinan personel yang sudah dialokasikan berhalangan (absen) karena sakit atau merawat keluarga yang sakit. Oleh karena itu

tim penanggulangan pandemi penyakit harus mencari pengganti penanggungjawab tersebut. Parameter untuk menentukan personil pengganti adalah:

- i. Kesetaraan kemampuan dan kecakapan.
- ii. Kesetaraan pengalaman kerja.
- iii. Jenjang dalam organisasi perusahaan.

Contoh Pelaksanaan Tahap 4

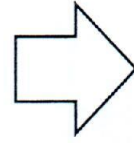
PT. XYZ

(Perusahaan Pertenuunan)

RESPON DAMPAK PANDEMI

| No | Situasi pemicu aktivasi respon | Skenario ancaman | Target respon | Tindakan pengendalian | Kebutuhan Sumber daya | Penanggung Jawab |
|----|--|--------------------------|--|---|--|---|
| 1 | WHO menyatakan dunia dalam pandemi dan episenter muncul diluar Indonesia | Karyawan sakit > 30% | Penularan tidak terjadi di tempat kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyegaran penyuluhan PHBS dan informasi tentang pandemi dan pencegahannya. 2. Penerapan <i>screening</i> suhu tubuh bagi karyawan dan pengunjung yang datang dari daerah terkena dampak/kemungkinan kontak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana 2. Ruang penyuluhan 3. Petugas K3 4. Peralatan penyuluhan 5. SOP <i>screening</i> 6. alat pengukur suhu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajer <i>Safety</i> 2. Manajer SDM 3. Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Kerja/Dokter perusahaan |
| | | Pasokan barang terganggu | Stok barang aman selama 6 bulan pasca deklarasi pandemi. | Melakukan penambahan stok barang dari beberapa pemasok terseleksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana 2. Gudang tambahan 3. Tenaga bongkar-muat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Manager Logistik. 2. Manager Produksi 3. Manager Pemasaran |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | Pencurian dalam area perusahaan. | Pencurian nihil. | <ol style="list-style-type: none"> Memperkuat perimeter. Memperkuat Satuan Pengamanan. Memperkuat peralatan PAM. | <ol style="list-style-type: none"> Personil Dana Peralatan pengamanan | <ol style="list-style-type: none"> Manager SDM Manager Logistik Manager Security |
| 2 | Telah terjadi penularan yang meluas di Indonesia dan wilayah sekitar tempat usaha | Karyawan sakit > 30% | Karyawan sakit maksimal 5% dan penularan tidak terjadi di tempat kerja | <ol style="list-style-type: none"> Penerapan <i>screening</i> suhu tubuh dan gejala ILI bagi karyawan dan pengunjung Penerapan pembatasan kontak (<i>social distancing</i>) ditempat kerja Penanganan karyawan sakit dengan gejala ILI di perusahaan | <ol style="list-style-type: none"> SOP <i>screening</i> Alat pengukur suhu SOP pembatasan kontak ditempat kerja SOP Penanganan Karyawan Sakit di Perusahaan, ruang isolasi, masker, no telp. Rumah Sakit | <ol style="list-style-type: none"> Manajer Safety Manajer SDM Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Kerja/Dokter perusahaan |



Dan seterusnya

E. TAHAP 5: MERANCANG DAN MENGIMPLEMENTASIKAN PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA

1. Merancang perencanaan

Seluruh informasi terkait yang telah diidentifikasi melalui tahap-tahap sebelumnya digabungkan dalam kerangka perencanaan keberlangsungan usaha dalam sebuah matriks.

Siapkan respon untuk beberapa skenario tingkat keparahan pandemi yang berbeda:

- a) pandemi ringan/sedang;
- b) pandemi berat.

Pertimbangkan tingkat keparahan yang berbeda yang mungkin diakibatkan pandemi, perencanaan keberlangsungan harus memperkirakan beberapa skema operasi; mulai dari aktivitas rutin hingga model khusus/darurat, bahkan sampai pada penghentian sementara kegiatan usaha.

Pertegas tindakan yang diperlukan untuk kesiapsiagaan, respon dan pemulihan dari kondisi darurat.

Manfaatkan tim darurat/tim penanggulangan pandemi untuk mulai merancang perencanaan keberlangsungan usaha. Siapkan respon yang disusun berdasarkan skenario tingkat keparahan dari pandemi yang mungkin muncul. Perencanaan harus mencakup seluruh skema operasi dari perusahaan, mulai dari aktivitas rutin perusahaan sampai ketinggian penghentian usaha sementara.

Kerangka yang dapat dipergunakan adalah seperti contoh berikut:

- a) Data rinci organisasi/perusahaan

Daftar kontak perusahaan secara rinci dan dijaga kemutakhirannya.

- b) Tim darurat atau tim penanggulangan pandemi (kontak dan peran)

Identifikasi orang-orang di perusahaan yang menjadi Tim Darurat/Penanggulangan Pandemi (ingat, staf/pekerja kunci telah diidentifikasi pada TAHAP 1).

Tim ini harus dibedakan dengan tim yang bertugas untuk menyusun rencana kesiapsiagaan dan respon terhadap pandemi. Tim darurat/penanggulangan pandemi adalah tim yang terdiri dari manager dan pekerja yang diperkirakan tetap bekerja selama pandemi terjadi (staf/pekerja kunci).

- c) Peran dan tanggung jawab harus disebutkan dengan jelas pada rencana serta kemungkinan penggantian (personel cadangan). Disarankan sebelum terjadi wabah penyakit, manajer atau staf yang yang diperkirakan bekerja selama wabah terjadi, bergabung dalam suatu diskusi bersama para pekerja secara bersama menyetujui parameter yang akan mendefinisikan tanggung jawab pekerja dan manajemen.

Selama diskusi dengan para pekerja, isu-isu berikut dapat diangkat:

- 1) Tanggung jawab manajemen untuk memindahkan/menghindarkan orang yang sakit dari lingkungan kerja.
- 2) Tanggung jawab manajemen untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, jika relevan dengan situasi lingkungan kerja.
- 3) Tanggung jawab manajemen untuk menyediakan perlindungan, seperti obat-obatan, bila tersedia, untuk mereka dengan risiko lingkungan kerja yang meningkat.
- 4) Tanggung jawab dari pekerja untuk bekerjasama atas setiap TAHAP-TAHAP keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan oleh pemberi kerja.
- 5) Tanggung jawab dari manajemen untuk membantu pekerja mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
- 6) Pemberdayaan komite bersama manajemen – pekerja untuk membahas masalah keselamatan lingkungan kerja.
- 7) Keikutsertaan dari pekerja dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan siapa saja yang wajar untuk dibebaskan dari pekerjaan di area dengan peningkatan risiko. Kelompok-kelompok tersebut dapat terdiri atas:
 - i. pekerja hamil atau sedang menyusui;
 - ii. pekerja senior;
 - iii. pekerja dengan kondisi medis yang dapat meningkatkan risiko mereka tertular atau meninggal karena penyakit;
 - iv. pekerja dengan kesulitan sosial atau psikis;
 - v. pekerja berkebutuhan khusus.

8) Komitmen terus menerus dari manajemen untuk merespon dengan tepat jika seorang pekerja memiliki perhatian khusus atas keselamatan dan kesehatan kerjanya.

9) Perlindungan pekerja dari setiap tindakan in-disipliner jika mereka, dengan niat baik, merasa ada suatu pelanggaran dalam keselamatan dan kesehatan kerja yang mengakibatkan mereka mengeluhkan kondisi kerja mereka.

Saat manajemen dan pekerja telah mengembangkan suatu sistem, berdasarkan pedoman pemerintah, yang menawarkan keseimbangan yang wajar antara perlindungan dan tanggung jawab dari pekerja, para pekerja harus diinformasikan dan patuh dengan keputusan tersebut.

d) Detil kontak eksternal.

Siapkan daftar yang memuat data seluruh kontak /pihak yang berkepentingan dari luar yang berurusan dengan usaha.

Daftar ini harus dijaga dan dimutakhirkan secara berkala.

e) Prosedur dan respon terhadap scenario.

Untuk setiap kemungkinan kejadian, identifikasi tindakan yang diperlukan, keterlibatan tanggung jawab dan dukungan dokumen serta sumber daya.

Setiap tim atau unit harus menyusun prosedur spesifik ini sebagai SOP mitigasi dan respon terhadap pandemi penyakit.

TAHAP 5 – Kerangka Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha
 RENCANA TINDAKAN

| Rincian Data Perusahaan | |
|-----------------------------|------------------------|
| Nama Perusahaan | PT. XYZ |
| Alamat | xxx |
| Lokasi (Rujukan arah jalan) | xxx |
| No Telp | xxxxx |
| No Fax | xxxxx |
| Alamat email | manajemen @ptxyz.co.id |

Tim Darurat/Penanggulangan Pandemi – Kontak dan Tugas

| Nama | No. Telpon Kantor | No. Telpon Rumah dan HP | Tugas pada saat kondisi darurat |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 1. Bapak A Cadangan: Bapak B | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | Penanggungjawab Logistik |
| 2. Bapak C Cadangan: Ibu D | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | Penanggungjawab Produksi dan Teknik |
| 3. Bapak E Cadangan: Ibu F | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | Penanggungjawab Keuangan |
| 4. Bapak G Cadangan: Bapak H | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxxx -xxxxxxxxxxx | Penanggungjawab SDM, Safety dan Security |

TAHAP 5 – Kerangka Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha

| Rincian Kontak Eksternal | | | |
|--|-------------------|----------------------------|--|
| Institusi dan Nama(+cadangan) pisahkan kolom ini | No. Telpon Kantor | No. Telpon rumah dan HP | Tugas pada saat kondisi darurat |
| Polisi | -xxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxx | Dukungan pengamanan apabila situasi keamanan setempat memburuk. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kapolsek • Wakapolsek | | | |
| Pemadam Kebakaran | | | Dukungan emergensi |
| RS - Ambulan | -xxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxx | Dukungan kesehatan |
| Perusahaan Asuransi | -xxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxx | Mencakup risiko kerugian perusahaan yang dipertanggungkan |
| Kontraktor | -xxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxx | Dukungan teknis produksi dan <i>maintenance</i> |
| Pemasok | -xxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxx | Dukungan bahan baku dan bahan penunjang |
| Asosiasi Pengusaha, Instanssi terkait | -xxxxxxxxxx | -xxxxxxxxxx | Menyediakan informasi situasi pemicu terbaru dari instansi pemerintah terkait dan mendistribusikannya di kalangan pengusaha. |

TAHAP 5 – Kerangka Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha

| Prosedur Tim Security dan Safety | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------|---|
| Tim: Security | | Manajer: Bapak G Manajer Cadangan: Bapak H | | |
| Sebelum kejadian – Tahap Persiapan | | | | |
| | Kegiatan | Penanggung Jawab | Waktu (Jam/hari) | Dukungan Dokumen/ Sumber Daya |
| | Menyusun prosedur SRA dan SOP screening dll. | Manajer Security | 20 hari | Manual Pengamanan Perusahaan, personil, komputer. |
| | Melaksanakan SRA | Security Officer | 7 hari | Personil dan ceklist SRA |
| | Presentasi hasil SRA | Manajer Security | 1 hari | LCD Projector, laptop |
| | Tindak lanjut atas rekomendasi temuan | 1. Manajer Security 2. Manajer Logistik | 30 hari | Dana |
| Sebelum kejadian – Tahap Persiapan | | | | |
| Situasi pemicu aktivasi | Kegiatan | Penanggung Jawab | Waktu (Jam/hari) | Dukungan Dokumen/ Sumber Daya |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| WHO menyatakan dunia dalam pandemi dan episenter muncul diluar Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Penyebaran penyuluhan PHBS dan informasi tentang pandemi dan pencegahannya.2. Penerapan screening suhu tubuh bagi karyawan dan | <ol style="list-style-type: none">1. Manajer Security2. Manajer Safety | 1 jam setelah situasi pemicu teridentifikasi | SOP Screening Karyawan di Pintu Masuk Perusahaan, termometer infra merah, Log Book hasil pemeriksaan. |
|--|--|---|--|--|

F. TAHAP 6: MENGGOMUNIKASIKAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA

PERENCANAAN

1. Sebarkan Perencanaan Keberlangsungan Usaha

Perencanaan yang telah disusun sangat penting untuk disosialisasikan secara internal (kepada pekerja dan jajaran manajemen) maupun secara eksternal (pelanggan, pemasok, dan lain-lain). Strategi komunikasi perlu disusun dengan memperhatikan:

- a) Kapan harus disampaikan detil rencana kepada pekerja, pihak luar atau pihak yang berkepentingan.
- b) Alat atau metode apa yang paling efektif dalam melakukan komunikasi untuk masing-masing sasaran.

2. Komunikasi Internal

Dalam melakukan komunikasi internal, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Menginformasikan secara jelas tentang penyakit ini dan bagaimana pencegahan serta penanganannya, jangan lupa bahwa pekerja juga harus meneruskan informasi ini kepada keluarga dan lingkungan mereka.
- b) Menginformasikan tentang perubahan kebijakan SDM/kepegawaian yang mungkin terjadi seperti kebijakan terkait perjalanan, cuti sakit dan kompensasi atas pembatasan aktivitas ekonomi sementara.
- c) Melakukan kajian ulang cara berkomunikasi yang akan dipergunakan, jaringan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan mempertimbangkan sistem komunikasi alternatif lain.
- d) Melakukan konsultasi dan memberikan umpan balik secara berkala untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi pada pekerja.
- e) Diperkirakan selama pandemi, banyak pekerja yang menolak untuk pergi bekerja. Ketakutan tersebut dapat dipahami, hal ini tergantung dari kondisi keselamatan di lingkungan kerja. Permasalahan ini harus dibahas dalam suatu forum yang objektif sehingga pekerja tidak merasa diabaikan atau tidak diperhatikan.

f) Mengoptimalkan peran Panitia Pembina K3 (P2K3), forum tripartit dan melibatkan keterwakilan serikat pekerja/buruh dalam mengomunikasikan perencanaan keberlangsungan usaha.

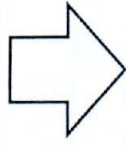
3. Komunikasi Eksternal

- a) Siapkan pesan-pesan yang jelas dan secara akurat diarahkan kepada pihak luar yang berkepentingan (pemasok, pelanggan, dan lain-lain) untuk mencegah ketakutan dan kepanikan.
- b) Bekerjasama dengan organisasi/perusahaan lain dan berbagi pengalaman yang dapat dipetik dari perencanaan keberlangsungan usaha pihak lain.
- c) Tetapkan satu petugas khusus (*contact person*) untuk berkomunikasi dengan instansi pemerintah atau lembaga kesehatan dalam mengoptimalkan pemahaman dan komunikasi atas rencana-rencana lain serta apa yang dapat disediakan selama pandemi.

TAHAP 6 – Kerangka Mengkomunikasikan Perencanaan

| Tujuan | Target Kelompok | Pesan Utama | Alat Komunikasi | Catatan |
|--|--|---|--|--|
| Pertegas tujuan yang harus dicapai sebagai bagian dari komunikasi rencana keberlangsungan usaha. | Identifikasi secara khusus siapa yang perlu menerima informasi/pesan tersebut (misal: karyawan, perwakilan serikat kerja, pelanggan, pemasok, mitra usaha dan lingkungan sekitar). | Rinci informasi yang harus disiapkan pada berbagai tahap kejadian (untuk memastikan tujuan tercapai). | Identifikasi alat-alat yang harus ada untuk mendistribusikan informasi tersebut (misal: kit informasi, lembar fakta, poster di tempat kerja, rapat perencanaan). | Identifikasi kapan, siapa dan bagaimana pesan akan dikomunikasikan, termasuk bagaimana dapat memeriksa tujuan telah tercapai. Sampaikan dengan satu suara melalui Tim Komunikasi Perusahaan. |
| Memberikan pemahaman akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Karyawan, Perwakilan Serikat Kerja. | Karyawan harus mengimplementasikan PHBS di tempat kerja untuk menekan risiko penularan. | Materi presentasi, peralatan presentasi, ruang pertemuan, poster, papan informasi. | Pesan lisan diberikan melalui <i>safety talk</i> setiap pagi sebelum bekerja. |
| Memberikan informasi kepada pemasok benang tentang perencanaan yang | Perusahaan produsen benang yang sudah | 1. Informasi tentang rencana keberlangsungan usaha yang telah | 1. Internet 2. <i>Business meeting</i> . | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| telah dibuat untuk suplai bahan baku. | diseleksi oleh Tim Logistik | disusun, yang dapat berdampak pada pemesanan 2. Motivasi kepada <i>suptier</i> untuk mulai membuat rencana keberlangsungan usaha terhadap ancaman pandemi | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|



Dan seterusnya

G. TAHAP 7: UJI PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA

Dalam siklus perencanaan, selalu ada komponen untuk menguji rencana yang telah disusun untuk keperluan perbaikan dari perencanaan tersebut. Pengujian terhadap suatu rencana harus dilakukan secara teratur untuk selalu dapat mengidentifikasi masalah baru dan merumuskan pemecahannya. Terutama pada bagian standar prosedur operasional (SPO), harus selalu dilakukan uji dan kajian untuk memastikan bahwa standar tersebut masih relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Ceklis sederhana dapat dipergunakan untuk menilai rencana yang telah disusun. Upaya kaji ulang terhadap SPO dan perencanaan keberlangsungan usaha perlu juga dilakukan dengan menggunakan simulasi, *table top*, *drill*, dan-lain-lain.

TAHAP 7 – Kerangka Uji Rencana

DAFTAR PERIKSA PERENCANAAN KEBERLANGSUNGAN USAHA

| Pertanyaan | YA | TIDAK |
|---|--------|--------|
| Apakah Produk dan layanan yang paling penting dari organisasi/perusahaan telah diketahui? Jika ya, sudahkah didokumentasikan? | X | X |
| Apakah dampak dari pandemi terhadap usaha dan perusahaan telah diketahui? Jika ya, apakah dampak-dampak tersebut sudah didokumentasikan? | X X | |
| Apakah staf/pekerja kunci dalam perusahaan dan peran mereka telah diketahui? Jika ya, sudahkah didokumentasikan? | | X X |
| Apakah keterampilan utama yang dibutuhkan untuk terus menghasilkan produk/layanan utama telah diketahui? Jika ya, sudahkah didokumentasikan? | X | X |
| Apakah sudah diketahui berapa lama kegiatan usaha dapat terus beroperasi dengan pekerja dan sumber yang terbatas? Jika ya, sudahkah didokumentasikan? | | X X |
| Apakah ahli dan/atau peralatan yang diperlukan untuk operasional penting telah diidentifikasi? Jika ya, sudahkah dirincikan? | X | X |
| Apakah telah diketahui, pemasok mana yang penting agar terus beroperasi? Jika ya, adakah pilihan alternatif yang tersedia? | X X | |
| Sudahkah diketahui bahwa mereka/pemasok masih mampu menyediakan produk/layanan yang diperlukan? Apakah karyawan/pekerja tahu apa yang harus dilakukan pada saat pandemi? | | X X |

| | | |
|---|---|---|
| Sudahkah kebijakan pembatasan sosial telah disusun? Apakah pekerja telah paham dan menerapkan praktek kebersihan pribadi dan praktek-praktek pembatasan sosial? | X | X |
| Sudahkah langkah-langkah pembatasan sosial seperti mencoba teknologi jika pekerja bekerja di rumah, membuat fasilitas konferensi jarak jauh, dan lain-lain, telah dikaji dan diuji coba? | | X |
| Apakah detail kontak atas pekerja, pemasok, perwakilan serikat pekerja jika dibutuhkan pada saat kondisi darurat telah ada/ <i>update</i> ? | X | |
| Apakah informasi ini disimpan pada lebih dari satu tempat? | | X |
| Apakah lokasi dan lingkungan perusahaan meningkatkan risiko terjadinya penularan (misal: meja resepsionis terbuka untuk umum)? | X | |
| Apakah telah tersedia persediaan masker, sarung tangan, deterjen, pembersih alkohol, dan lain-lain? | | X |
| Apakah telah tersedia dana cadangan? | X | |
| Dapatkah karyawan menjalankan tugas yang berbeda untuk memastikan dapat melakukan layanan atau pekerjaan layanan jika diperlukan (misal: sudahkah pekerja diberi pelatihan pekerjaan yang berbeda)? | | X |
| Pada kondisi darurat, apakah pekerja dapat/ mudah mengakses informasi yang dibutuhkan (misal : dapatkan beberapa orang memiliki kunci akses, jalan masuk, kombinasi lemari besi)? | | X |
| Sudahkah kemungkinan langkah-langkah respon dibahas dengan perwakilan serikat pekerja? | | X |

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB V
PENUTUP

Panduan penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit ini disusun untuk membantu mempersiapkan perencanaan perusahaan dalam menghadapi pandemi penyakit. Perusahaan diharapkan dapat menyusun dan mempunyai perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis usaha masing-masing.

Untuk menghasilkan perencanaan yang komprehensif, maka perusahaan diharapkan berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha yang disesuaikan dengan keadaan atau situasi pandemi yang sedang terjadi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

